

EFEKTIVITAS BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH DALAM MEMFASILITASI URUSAN PEMERINTAH ACEH KE PEMERINTAH PUSAT GUNA MEMAJUKAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH.

Tri Maharani¹⁾, Dadan Kurnia¹⁾, Toto Kushartono¹⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Email: trimaharani816@gmail.com

Abstrak

Badan Penghubung Pemerintah Aceh, adalah badan Daerah yang satu-satunya terletak di Ibu Kota Negara, setelah diterbentuknya Badan Penghubung Pemerintah Aceh sebagai fasilitator kebutuhan daerah dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat maka peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam memfasilitasi urusan Pemerintah Aceh ke Pemerintah Pusat dalam membantu memajukan pembangunan Daerah Aceh, penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan 1) Karakteristik Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Aceh terdiri dari Kepala Badan yang dipimpin oleh Eselon III, Subbidang tata usaha, Subbidang Pelayanan dan Informasi, Subbidang Hubungan Antar Lembaga, Subbidang Promosi dan Pameran, yang seluruhnya dipimpin oleh Eselon IV. 2) Karakteristik Lingkungan Badan Penghubung Pemerintah Aceh berada dalam lingkup pemerintahan kota yang sangat dekat dengan pemerintahan pusat. 3) Karakteristik Pekerja sebagian besar pegawai berasal dari daerah Aceh yang memiliki nilai adat dan budaya yang sama. 4) Kebijakan dan Praktek Manajemen dalam Renstra 2017-2022 tertuang yang menjadi kebijakan pemerintah daerah dalam menyusun usaha-usaha untuk membangun daerah aceh berpointkan pada terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas, terwujudnya tata budaya adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami, terwujudnya informasi dan data yang terintegritas.

Kata Kunci: Efektivitas, Fasilitasi Hubungan Urusan Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Pusat

Abstract

Aceh Government Liaison Agency, is a Regional agency which is only located in the Capital City, after the establishment of the Aceh Government Liaison Agency as a facilitator of regional needs in collaborating with the central government, researchers want to know how the effectiveness of the Aceh Government Liaison Agency in facilitating Aceh Government affairs to The Central Government in helping to advance the development of the Aceh Region, this research was conducted using a qualitative descriptive method, the results of the study showed

1) Organizational characteristics of the Aceh Government Liaison Agency consisting of the Head of the Agency led by Echelon III, the Administration Sub-Sector, the Service and Information Sub-Sector, the Inter-Relations Sub-Sector. Institutions, Promotion and Exhibition Sub-sectors, which are entirely led by Echelon IV. 2) Environmental Characteristics The Aceh Government Liaison Agency is within the scope of city administration which is very close to the central government. 3) Characteristics of workers, most of the employees come from the Aceh region who have the same customary and cultural values. 4) Management Policies and Practices in the 2017-2022 Strategic Plan are stated as local government policies in formulating efforts to develop Aceh areas which point to the realization of reforms. quality bureaucracy, the realization of an Islamic cultural system, customs and arts, the realization of integrated information and data.

Keywords: *Effectiveness, Facility Relations between Local Government Affairs and Central Government*

PENDAHULUAN

Aceh adalah salah satu daerah terujung di Indonesia yang berbatasan langsung dengan selat Malaka dan memiliki potensi alam paling menjanjikan, letak daerah Aceh yang digadang-gadang pada masa yang akan datang untuk berfokus pada Zona Ekonomi Eksklusif sebagai jalur pelayaran perdagangan bangsa di dunia menjadikan suatu harapan daerah untuk dapat membuka seluruh potensi daerah agar diproduksi dengan sangat efektif, hingga nantinya menjadi penyokong utama pendapatan daerah yang tentu akan menghidupkan kembali satu persatu sumber pendapatan daerah. Aceh memiliki banyak potensi alam dan nilai potensi tersebut cukup besar untuk diolah menjadi sumber pendapatan Negara, yang menjadi masalah mengapa daerah Aceh tetap berada diposisi sebagai daerah tertinggal adalah pembangunan ekonomi daerah belum difokuskan pada satu potensi, misalnya pembangunan pada zona ekonomi eksklusif yang memiliki nilai keberhasilan paling menjanjikan untuk kemajuan daerah. Saat ini pemerintah Aceh tengah gencar-gencarnya melakukan perombakan dan pembenahan pada seluruh sendi-sendi daerah, terlihat bahwa pembenahan transportasi dan akses daerah kini tengah dalam masa perbaikan, dibuktikan dengan gencarnya Gubernur Aceh dalam memproduksi kapal layar milik daerah Aceh, sendi

lain yang menjadi fokus pembenahan pemerintah aceh adalah pendidikan dan pengelolaan sumber daya alam. Untuk memudahkan usaha tersebut daerah Aceh memiliki kendala dalam letak daerah yang terisolasi dari kaca mata pemerintah pusat dan dunia internasional, maka dari itu pemerintah aceh membentuk Badan Penghubung Pemerintah Daerah Aceh yang terletak di Ibu Kota Negara.

Pembentukan badan penghubung tersebut berdasar hukum pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 yang merupakan instruksi menteri dalam negeri, dengan tujuan untuk membuka belunggu yang menutup potensi daerah agar mendapatkan investornya, dan menjadi aliran ekonomi pendapatan daerah. Dalam PP No18 Tahun 2016 tersebut berbunyi ” untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pembangunan dengan pemerintah pusat, daerah provinsi dapat membentuk badan penghubung daerah provinsi di Ibu Kota Negara”.

Pembentukan perangkat daerah tersebut dibentuk berdasarkan asas sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
2. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah
3. Efisiensi
4. Efektivitas
5. Pembagian habis tugas
6. Rentang kendali
7. Fleksibilitas

Pembentukan badan penghubung juga didasarkan pada luas daerah, jumlah penduduk, potensi dan sumber daya alam yang dimiliki. Secara karakteristik tersebut Provinsi Aceh memiliki luas wilayah 56 770,81 Km², 18 Kabupaten, 5 Kota, dengan jumlah penduduk 4,732 juta jiwa yang tersebar diseluruh wilayah indonesia yang jika dilihat secara potensi alam

pada hasil tambang Aceh meliputi batu bara, minyak bumi, gas alam, emas dan tembaga. Selain itu, terdapat tambang emas di daerah Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, dan Aceh Barat. Tambang biji besi terdapat di Aceh Besar, Aceh Barat, dan Aceh Selatan. Tambang mangan terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara dan Aceh Barat. Sementara tambang biji timah, batu bara, dan minyak bumi terdapat di Aceh Barat dan Aceh Timur, yakni di Rantau Kuala dan Sim-pang Peureulak, serta gas alam di daerah Lhok Sukon dan Kabupaten Aceh Utara.

Dengan segala potensi yang dimiliki tersebut, pemerintah aceh berharap setelah dibentuknya badan penghubung pemerintah daerah yang berpusat di Ibu Kota Negara dapat membuka pandangan pemeritah pusat dan dunia internasional untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya tersebut bersama-sama yang tentu tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Badan Penghubung Pemerintah Aceh memiliki tugas sebagai fasilitator untuk menjalankan fasilitasi hubungan kerja Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi lain, fasilitasi hubungan kerja dengan Perwakilan Negara Asing di Jakarta, Fasilitasi Hubungan Lembaga Swasta Nasional dan Internasional yang memiliki perwakilan di Jakarta, pelaksana fasilitasi kunjungan kerja Gubernur dan pejabat daerah Aceh, pelaksana failitas promosi potensi, sumber daya alam dan budaya, dan koordinasi dengan instansi terkait pengelolaan keuangan Aceh. Dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Badan penghubung Pemerintah Aceh tersebut memiliki peran dalam pemfasilitasi segala urusan administrasi yang sifatnya non teknis, hanya bertugas dalam memfasilitasi segala kebutuhan Pemerintah Daerah ketika melakukan kunjungan kerja.

Oleh sebab itu bagaimana efektivitas Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam memfasilitasi urusan Pemerintah Aceh ke Pemerintah Pusat dalam membantu pembangunan di daerah, yang dijelaskan oleh Hidayat (1986:30):"Efektivitas merupakan sejauh mana persentase input yang diliat dari(Kualitas, Kuantitas, dan Waktu) dapat dicapai".

Pendapat tersebut didukung pula oleh Siagian(2001:24) yang menjelaskan: “ Efektivitas adalah pemanfaatan segala fasilitas baik sumber daya maupun hal-hal lain yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk melakukan program yang direncanakan agar terwujudnya keberhasilan, dan efektivitas ditunjukkan dengan terwujudnya keberhasilan dari sasaran tersebut”.

Untuk menguraikan efektivitas dari Badan Penghubung Pemerintah Aceh, peneliti menggunakan teori efektivitas organisasi oleh Steers (2005) dalam *Efektivitas Organisasi*, yang mengolongkan faktor-faktor efektivitas Organisasi, yaitu: Karakteristik Organisasi, Karakteristik Lingkungan, Karakteristik Pekerja, Kebijakan dan praktek Manajemen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam memfasilitasi hubungan urusan Pemerintah Aceh ke Pemerintah Pusat guna membantu memajukan pembangunan Daerah Aceh.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif ditujukan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai suatu variable. Menurut Sugiyono (2017:7) :” Penelitian kualitatif adalah metode penelitian baru yang dinamakan dengan metode Postpositivistik. Metode ini sering digunakan sebagai metode artistik Karena proses penelitiannya lebih bersifat seni dan disebut metode interpretive karena data hasil penelitian yang didapat lebih bersifat interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan”.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Badan Penghubung Pemerintah Aceh yang berada di Jakarta Pusat serta informan penelitian ini adalah Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh yang menjadi perwakilan pemerintah daerah yang berada diprovinsi.

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono(2017:224) pengumpulan data dibagi menjadi tiga yaitu:” Data Primer, merupakan data langsung yang diberikan pada peneliti, data observasi, merupakan data yang didapatkan melalui kegiatan untuk mengumpulkan data yang kompleks,, studi pustaka, digunakan untuk mengumpulkan data yang berasal dari jurnal maupun sumber-sumber referensi lain yang sesuai dengan subjek penelitian, dan dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari dokumen hasil kegiatan”.

Teknik analisis data menggunakan melakukan triangulasi pada seluruh data yang ada dengan cara mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Rencana pengujian keabsahan data menggunakan teori yang berasal dari Sugiyono(2018:185) yang mengolongkan rencana pengujian data terdiri dari: 1.Uji Kredibilitas, Pengujian Dependability Disebut juga dengan uji realibilitas, suatu penelitian yang reliable adalah penelitian yang dapat digunakan atau diulangi oleh oranglain untuk mereplikasi proses penelitian tersebut, dan proses ini dilakukan oleh pembimbing yang independen untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.3. Pengujian Confirmability Yang prosesnya hampir sama dengan uji Dependability, dilakukan dengan menguji hasil penelitian dengan proses yang dilakukan.

PEMBAHASAN

Karakteristik Badan Penghubung Pemerintah Aceh

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh No.105 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi, Struktur Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Aceh mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas Pemerintah Aceh untuk mendukung kelancaran

hubungan dan kerja sama, membina masyarakat aceh perantauan diWilayah Pulau Jawa dan sekitarnya, menyelenggarakan promosi daerah, mengelola Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah dan asset Pemerintah Aceh yang ada dipulau Jawa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Badan Penghubung Pemerintah Aceh memiliki Fungsi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh No.105 Tahun 2016 sebagai berikut: a. Pelaksana fasilitas hubungan kerja pemerintah Aceh dengan pemerintah dan pemerintah provinsi lainnya, b. Pelaksana fasilitas hubungan kerja dengan perwakilan Negara asing diJakarta, c. Pelaksana fasilitas hubungan kerja dengan instansi/ lembaga swasta nasional dan lembaga internasional yang mewakili perwakilan di Jakarta, d. Pelaksana fasilitas kunjungan kerja Gubernur/Pejabat Aceh yang sedang diJakarta dan sekitarnya, e. Pelaksana fasilitasi promosi potensi, sumber daya alam dan seni budaya, f. Pelaksana koordinasi dengan instansi dan/ atau lembaga terkait lainnya dibidang pengelolaan dan keuangan Aceh.

Berdasarkan isi dari peraturan tersebut maka dapat dipahami bahwasanya , Badan Penghubung Pemerintah Aceh befungsi sebagai pelaksana fasilitas hubungan kerja Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang sifatnya bertugas dalam memfasilitasi urusan administrasi yang non teknis dalam usaha pembangunan Daerah.

Struktru Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Aceh berdasarkan Pergub No.105 Tahun 2016 terdiri dari: Kepala Badan, Subbagian Tata Usaha, Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat, Subbidang Pelayanan dan Informasi, Subbidang Promosi dan Pameran, Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, dapat dilihat bahwasanya Badan Penghubung Pemerintah Aceh dapat dikatakan tidak sesuai dengan perangkat daerah setingkat Badan seperti pada umumnya yang

dimana pada perangkat daerah setingkat Badan seharusnya dipimpin oleh Kepala Badan dengan jabatan Eselon IIa namun Badan Penghubung Pemerintah Aceh dipimpin oleh Kepala Badan dengan jabatan Eselon IIIa yang berdampak pada struktur organisasi dimana seharusnya terdiri dari kepala dan sekretari namun pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh hanya ada Kepala dan Subbidang.

Karakteristik Lingkungan Badan Penghubung Pemerintah Aceh

Lingkungan pemerintahan Badan Penghubung Pemerintah Aceh dapat dikategorikan sangat baik, hal ini dinilai peneliti berdasarkan data yang ditemukan. Lokasi kantor yang berada dipusat pemerintahan menjadikan suatu kemudahan bagi Badan Penghubung Pemerintah Aceh untuk merespon dengan cepat segala kebutuhan pemerintah daerah terkait lancarnya komunikasi dan kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah pusat. Narasumber selaku staf bidang budaya menuturkan sebagai berikut:

“Jika dari sisi letak kantor, posisi kantor mereka sangat strategis karena berada dipusat kota dan akses menuju kantor tersebut sangat mudah” (Evi Mayasari).

Karakteristik Pekerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh

Jumlah pekerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh terdiri dari 49 orang dengan pekerja honorer berjumlah 26 orang. Untuk jumlah pekerja tersebut tergolong sangat sedikit, mengingat tugas yang dimiliki oleh BPPA sangat besar untuk memberikan fasilitas pelayanan terhadap seluruh aparat pemerintah daerah Aceh yang sedang melakukan kunjungan kerja kedaerah jabodetabek. Sebagian besar pekerja atau pegawai yang ada berasal dari daerah Aceh yang dimutasikan oleh pemerintah daerah untuk menduduki posisi-posisi di Badan Penghubung Pemerintah Aceh, sedangkan untuk pegawai honorer berasal dari sekitaran daerah jabodetaek. Secara karakteristik pekerja Badan

Penghubung Pemerintah Aceh sama seperti karakteristik pekerja dikantor yang basis tugasnya adalah penyelenggaraan pelayanan kepada pemerintah dan masyarakat, yang memberikan pelayanan dan pengayoman pada masyarakat aceh diperantauan untuk tetap mendapatkan hak dan kewajibanya sebagai masyarakat daerah aceh.

Kebijakan dan praktek Manajemen

Penetapan Tujuan Srategis

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Meningkatkan kualitas Birokrasi pelayanan publik	Tingkat/Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan penghubung Pemerintah Aceh	35%	45%	50%	65 %	85 %
2	Terwujudnya Tata Budaya Adat Istiadat dan Seni ke-Acehan yang Islami	Memperkuat Tata Budaya Adat Istiadat dan Seni ke-Acehan yang Islami	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Aceh di Jakarta	8 keg	9 keg	10	11	12
			Jumlah pengunjung pada pelaksanaan kegiatan promosi dan pameran Seni budaya Aceh islami yang dilaksanakan Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jabodetabek	15000	15500/orang	16000	16500	17000
3	Terwujudnya Informasi dan Data yang Terintegrasi	Meningkatkan kualitas datad an informasi yang terintegrasi melalui website	Jumlah Pengakses Data dan Informasi pada Website Badan Penghubung Pemerintah Aceh	1300	1700	1900	2500	2800
			Tingkat/Persentase kepuasan pengakses data dan informasi pada website Badan Penghubung Pemerintah Aceh	30 %	34 %	38 %	50 %	56%

			Pemerintah Aceh					
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

Dalam tabel terlihat bahwasanya, tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas Badan Penghubung Pemerintah Aceh tampak hanya mengurus hal-hal yang bersifat umum dan tidak menjurus pada strategi terbaik untuk melancarkan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Pencarian dan Pemanfaatan Sumber Daya

Dalam Badan Penghubung Pemerintah Aceh didanai oleh APBD dan APBN yang menjadi sumber utama pengelolaan segala urusan dan kegiatan Badan Penghubung Pemerintah Aceh. Selain sumber keuangan dari APBN dan APBD sumber lain juga berasal dari,; Sumber daya manusia yaitu Dalam struktur organisasi Pemerintah Aceh, Badan Penghubung berada pada jenjang eselonering III.a. Satuan kerja ini terdiri dari 4 (empat) jabatan eselon IV.a, yaitu :KepalaBadan, Sub Bagian TataUsaha, Subbidang Hubungan Antar Lembaga danMasyarakat, Subbidang Pelayanan dan Informasi, Subbidang PromosidanPameran. Sumber daya Asset dan Modal terdiri dari : Kantor di JL indramayu No.1 Menteng Jakarta Pusat, luas lahan ± 491m². Rumah Dinas Kepala Badan Mess Pemerintah Aceh di JL RP. Soeroso No.14, Cikini –Jakarta Pusat, dengan luas lahan± 2148 m². Mess ini terdiri dari 8 lantai dan 2 basement untuk parkir, memiliki 65 kamar untuk penginapan dan 1 Aula besar pertemuan dengan segala fasilitas penunjang lainnya. Badan Penghubung Pemerintah Aceh juga mengelola Anjungan Aceh TMII, namun status tanah pinjam pakai, sedangkan bangunan Anjungan menjadi asset Badan Pengubung Pemerintah Aceh.

Lingkungan Prestasi Badan Penghubung Pemerintah Aceh

BBPA memiliki tugas yang banyak berkaitan dengan pengelolaan dan promosi daerah, menurut pendapat Staf Hubungan antar Lembaga BPPA yang bisa dikatakan sebagai capaian prestasi yang telah dicapai BPPA saat ini ialah, sudah banyaknya asset daerah yang tersertifikasi, memberi bantuan rumah singgah, transportasi, melaksanakan kegiatan festival Ratoeh Jore berskala nasional, terlibat langsung dalam memperebutkan piala gubernur, dan saat ini sedang berusaha untuk mengembangkan tari Ratoeh Jore yang menjadi ekstrakurikuler disekolah jabodetabek, agar dapat pula menjadi kegiatan ekstrakurikuler sekolah diluar jabodetabek, selain itu juga berhasil melancarkan hubungan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan UEA terkait penanaman modal dan investasi untuk daerah Aceh.

Proses Komunikasi Badan Penghubung Pemerintah Aceh

Dalam kinerjanya untuk memfasilitasi segala urusan pemerintah aceh dengan pemerintah pusat, menurut penuturan Kasi Nilai Budaya, selama menjalin hubungan kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah Pusat, Badan Penghubung Pemerintah Aceh menerima bentuk komunikasi yang sifatnya formal melalui kantor ataupun bersifat pribadi yang langsung berhubungan dengan aparat BPPA. Komunikasi yang dilakukan juga dapat melalui email resmi maupun watshap yang langsung berhubungan dengan pegawai yang bersangkutan. Dalam penuturannya narasumber juga mengatakan, bahwa Badan Penghubung Pemerintah Aceh sangat fleksibel, dalam membantu mempercepat proses administrasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi ketika sedang menjalin hubungan kerjasama dengan instansi atau investor. Hal ini tentu menjadi kemudahan bagi daerah dalam mempercepat segala proses komunikasi dengan pihak luar yang diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah daerah.

Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Badan Penghubung Pemerintah Aceh wajib melaksanakan Sistem pengendalian internal. Dari Peraturan Gubernur tersebut dapat dipahami bahwa BPPA dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi Kepala Subbagian, Kepala Subbidang yang wajib melakukan koordinasi antar satu sama lain, dengan begitu kepemimpinan dan pengambilan keputusan didalam lingkungan BPPA berjalan dengan budaya musyawarah yang baik.

Adaptasi dan Inovasi Organisasi

Badan Penghubung Pemerintah Aceh merupakan badan daerah yang kantornya terletak diluar daerah, dengan budaya dan karakteristik daerah yang berbeda tentu BPPA mengalami banyak reduksi budaya. Secara alamiah kantor yang terletak didekat Ibu Kota tentu berbeda kondisinya dengan kantor daerah yang berada dilokal daerah, suasana kompetisi dalam menjalankan pemerintahan daerah yang baik terasa lebih kompetitif. Dalam melakukan inovasi Badan Penghubung Pemerintah Aceh berdasarkan pengamatan dan data yang ditemukan oleh peneliti terlihat bahwa sebagian besar kegiatan yang dilakukan ide dan gagasannya berasal dari internal Badan Penghubung Pemerintah Aceh, data lain menunjukkan dalam kegiatan Tari Ratoh Jore yang sudah menjadi kegiatan ekstrakurikuler pada seluruh sekolah di jabodetabek dan diluar jabodetabek merupak bentuk keseriuhan Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam menjalankan tugas promosi dan penerapan budaya Aceh yang memberikan hasil cukup baik dalam menyebarkan nilai-nilai budaya asli daerah.

Kesimpulan

Efektivitas Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam membantu memfasilitasi segala urusan pemerintah aceh sengan pemerintah pusat dapat dikategorikan sangat efektif. Keefektivan tersebut dilihat dari input tugas yang ada seluruhnya dapat diproses dengan cepat oleh Badan Penghubung Pemerintah Aceh. Yang menjadi masalah iyalah, input tugas yang masuk tersebut sebagian besar hanya berasal dari urusan-urusan umum sedangkan untuk usaha mempercepat pembangunan bangsa belum terlihat adanya perkembangan yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat. (1986). Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan . Yogyakarta: Gajah Mada University press.
- Kushandajani2018Makna Otonomi Daerah di Wiayah Laut Bagi Masyarakat Pesisir-cet2semarangFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
- Siagian, S. P. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers, R. M. (2005). Manajemen Organisasi Terjemahan Magdalena Jamin. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono, P. D. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Peratura Pemerintah Nomor.18 Perangkat Daerah . (2016). Retrieved 7 8,2020,fromBkn.go.id:<https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2016/10/PP-NOMOR-18-TAHUN-2016-PERANGKAT-DAERAH.pdf>

Qanun Aceh No. 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. (2016). Retrieved 7 8, 2020, from dishub.acehprof.go.id: <https://dishub.acehprov.go.id/download/qanun-aceh-no-13-tahun-2016-tentang-pembentukan-dan-susunan-perangkat-aceh/>

Peratura Pemerintah Nomor.18 Perangkat Daerah . (2016). Retrieved 7 8, 2020,fromBkn.go.id:<https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2016/10/PP-NOMOR-18-TAHUN-2016-PERANGKAT-DAERAH.pdf>

<https://penghubung.acehprov.go.id/dokumen/>